



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS IRWANTO
2. Jabatan : KEPALA SATPOL PP KOTA
3. NHK : 45509

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.710.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 155.000.000
3. Tanah Seluas 3140 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 825.000.000
4. Tanah Seluas 2700 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.650.000.000
6. Tanah Seluas 4494 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, Rp. 900.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 528 m2/200 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/100 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **398.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000



2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI

Rp. 88.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 247.990.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.668.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 15.000.000

Sub Total Rp. 7.388.658.000

III. HUTANG Rp. 26.598.777

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.362.059.223

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.